

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kolombia merupakan salah satu dari empat negara terbesar di Amerika Selatan setelah Brasil, Argentina, dan Peru. Untuk letak negara ini sendiri, Kolombia merupakan sebuah negara yang berlokasi begitu strategis, yang di mana negara ini berlokasi tepat antara Amerika Selatan dengan Amerika Tengah. Kolombia merupakan satu-satunya negara di Amerika Selatan yang memiliki garis pantai di wilayah Laut Karibia dan Samudera Pasifik. Kolombia berbatasan langsung dengan Panama, yang sama-sama terbagi menjadi 2 perairan, serta dengan Brasil dan Venezuela di Timur, dan Peru serta Ekuador di Selatan. Populasi penduduk dari Kolombia sendiri sebagian besar terkonsentrasi di pedalaman pegunungan, yang mana Bogota, ibu kota negara Kolombia terletak di dataran tinggi di Pegunungan Andes Utara.

Kondisi geografis Kolombia yang berbatasan langsung dengan beberapa negara Amerika Selatan dengan dinamika kondisi domestik yang berbeda-beda, membuat potensi mobilitas masyarakat untuk masuk dan keluar Kolombia sangat besar, termasuk para pengungsi yang ingin menyelamatkan diri dari konflik dan persoalan dalam negerinya. Salah satunya adalah para pengungsi yang memasuki wilayah Kolombia dari Venezuela yang sedang terjadi krisis. Belakangan ini Venezuela telah terjadi gejolak politik yang terjadi di negara tersebut. Pada 2019 sendiri, pemimpin oposisi yaitu Juan Guaido mendeklarasikan dirinya sebagai presiden interim Venezuela. Hal tersebut dilakukan sebagai respon atas pemilu sebelumnya yang dianggap banyak terjadi kecurangan (Tempo.co, 2019). Langkah yang dilakukan oleh Guaido tersebut bukan tanpa dukungan, Amerika Serikat dan Uni Eropa, Kanada, Brasil, Argentina, Kolombia, Inggris juga mendukung langkah yang diambil oleh Guaido. Namun Nicolas Maduro yang merupakan presiden terpilih pada pemilu sebelumnya langsung membantah hal tersebut (CNN, 2019).

Perpolitikan di negara Venezuela yang sedang kacau diperparah dengan krisis ekonomi yang menimpa negara tersebut. Venezuela yang mana merupakan negara yang ekonominya sebagian besar ditopang oleh sektor minyak mulai mengalami gejolak krisis setelah turunnya harga minyak dunia pada 2013 (Suastha, 2018). Tidak hanya itu, sanksi

ekonomi yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada Venezuela memperparah keadaan ekonomi di negara Venezuela menjadi semakin buruk, bahkan angka inflasi yang terjadi di Venezuela pada 2019 saja sudah mencapai 1,7 juta persen (Kompas, 2019). Akibat dari krisis yang terjadi di Venezuela tersebut, telah terjadi eksodus yang dilakukan oleh warga negara Venezuela ke negara tetangga.

Hingga Januari 2021, total penduduk yang mengungsi dari Venezuela ke berbagai negara telah mencapai 5,4 Juta, yang di mana 4,6 Juta dari total pengungsi tersebut mengungsi ke negara tetangga di wilayah Amerika. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh *United Nations High Commissioner for Refugees*, 1,7 juta pengungsi Venezuela menuju ke Kolombia, diikuti oleh Peru dengan 1 juta pengungsi, Chile 457.300, Ekuador 417.200, Brasil 262.500, Amerika tengah dan Mexico 252.300, negara *Southern Corn* sebanyak 204.700, dan negara di kepulauan Karibia sebanyak 195.800 (UNHCR, 2021). Tidak menutup kemungkinan bahwa dengan datangnya para pengungsi dari berbagai kalangan, serta dengan berbagai latar belakang yang berbeda yang bertujuan untuk mencari kehidupan yang lebih baik dapat menimbulkan berbagai masalah baru. Hingga memunculkan *xenophobia* di negara tertentu. Namun hak tersebut perlu digarisbawahi bahwa tidak semua dari pengungsi melakukan kejahatan di negara tempat tujuan pengungsi tersebut.

Melihat data statistik yang sudah ada, ditemukan fakta bahwa Kolombia menjadi negara dengan total pengungsi terbanyak dari Venezuela, tepatnya bagi 1,7 juta orang Venezuela, yang mewakili lebih dari 37 persen dari perkiraan 4,6 juta pengungsi dan migran Venezuela di Amerika Latin dan Karibia. Lebih dari setengah populasi Venezuela di Kolombia tidak memiliki status reguler, yang memengaruhi kemampuan mereka untuk mengakses layanan perlindungan, dan bantuan penting. Karena itu Kolombia mengeluarkan beberapa kebijakan seperti memberikan status perlindungan sementara sepuluh tahun kepada orang-orang Venezuela di negara Kolombia. Status Perlindungan Sementara juga akan memberikan akses ke layanan dasar termasuk sistem kesehatan nasional dan rencana vaksinasi COVID-19.

Jika melihat sejarah yang pernah terjadi, terutama di kawasan Amerika Latin, krisis kemanusiaan yang terjadi yang mengakibatkan mengungsinya suatu warga negara ke negara lain bukanlah yang pertama kali terjadi. Kolombia yang pernah dikenal sebagai

negara penghasil narkotika terbesar di dunia, mengakibatkan negara itu pernah mengalami kekacauan. Seperti tindak kekerasan, pencurian, bahkan pembunuhan. Hingga konflik yang terjadi antara pemerintah dengan kelompok bersenjata di negara tersebut, membuat negara tersebut mengalami krisis berkepanjangan hingga 5 dekade terhitung semenjak 1960. Mengakibatkan 7,6 juta warga negara Kolombia sempat mengungsi ke berbagai negara akibat dari krisis yang terjadi. Di sisi lain, Venezuela adalah negara yang sedang makmur karena adanya *oil bomb* di negara tersebut antara 1970-1980. Melihat letak geografis yang dekat, membuat 1 juta dari total pengungsi dari Kolombia pergi ke Venezuela. Berbagai kebijakan juga dibuat Venezuela untuk merespon pengungsi dari Kolombia yang datang ke negara tersebut. (Carvajal, 2017).

Melihat fakta tentang krisis kemanusiaan yang terjadi di Amerika Latin, salah satunya adalah akibat dari jumlah pengungsi yang meninggalkan negaranya akibat dari krisis yang terjadi di Venezuela. Kolombia menjadi salah satu negara yang menerima pengungsi Venezuela, bahkan menjadi negara dengan penerimaan pengungsi terbanyak. Namun disamping itu, Kolombia adalah sebuah negara yang masih dilanda berbagai konflik akibat dari masalah yang terjadi beberapa dekade lalu. Seperti pada 2016, setelah menandatangani perjanjian damai dengan kelompok bersenjata FARC (*Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia*), membuat warga negara Kolombia terpecah karena masih banyaknya warga negara Kolombia yang tidak setuju dengan perjanjian tersebut (BBC, 2016). Selanjutnya demonstrasi yang terus terjadi di Kolombia yang dilakukan oleh rakyat Kolombia atas respon dari keadaan Kolombia tentang ketidakadilan secara struktural, kemiskinan, reformasi tanah, fasilitas kesehatan, dan kurangnya untuk mengenyam pendidikan bagi warga Kolombia. Hal ini diperparah dengan krisis pandemi yang sedang terjadi sejak 2020 (Kirby, 2021). Namun, presiden Kolombia saat ini yaitu Iván Duque Márquez tetap melakukan kebijakan yaitu menerima pengungsi dari Venezuela. Dalam pernyataannya, presiden Iván Duque Márquez mengatakan “*We want to set an example and [be] a reference that can be adopted by other countries. We want to demonstrate that although we're not a rich country, we can do something that is humanitarian, that is fraternal, but at the same time is an intelligent and sound migration policy*”. Selanjutnya presiden Iván Duque Márquez mengatakan “*We have built a brotherhood with Venezuela. [During Colombia's drug-fueled guerrilla war] there were hundreds and thousands of*

Colombians that went to Venezuela and found an opportunity. I believe that once there's a recovery in Venezuela and once people go back to Venezuela they will always remember those who gave them support in Colombia. And that will strengthen our relations like never before” (npr, 2021).

Imigrasi pengungsi Venezuela yang terjadi secara besar-besaran di negara kawasan Amerika Latin seperti Kolombia, Peru, Ekuador, Brasil, Mexico, dan negara *southern corn* seperti Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina, bahkan hingga ke negara kepulauan Karibia tidak diragukan lagi telah menciptakan tantangan sosial dan ekonomi yang harus ditangani dan dikelola. Disisi lain, hanya Kolombia yang menjadi negara dengan tujuan pengungsi terbanyak dari Venezuela. Presiden Kolombia yaitu Iván Duque Márquez secara terang-terangan menerapkan kebijakan tentang akan selalu menerima pengungsi dari Venezuela.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis memutuskan untuk menganalisis tentang **Mengapa Kolombia mau menerima sebagian besar pengungsi dari Venezuela?**

1.3 Kerangka Pemikiran

1.3.1 Konstruktivisme

Konstruktivisme, sejatinya adalah salah satu perspektif yang dikembangkan juga digunakan dalam studi Sosiologi. Setidaknya sejak abad ke-18 sudah ditemukan tulisan mengenai perspektif konstruktivisme. Salah satu yang berkontribusi dalam perkembangan konstruktivisme yaitu Giambattista Vico. Selanjutnya, konstruktivisme yang hadir dan dikembangkan dalam studi hubungan internasional adalah bagian dari “keranjang” besar yang bernama post modernisme bersama perspektif kritis, post kolonialisme dan feminimisme. Konstruktivisme sebagaimana perspektif post modernisme lainnya ditransformasikan oleh para ilmuwan hubungan internasional sebagai alat analisis dalam studi ini salah satunya disebabkan oleh keidakpuasan sebagian para ilmuwan hubungan internasional dalam menerima penjelasan perspektif arus utama dalam studi hubungan internasional.

Dalam studi hubungan internasional, beberapa dari pendekatan klasik seperti realisme dan liberalisme memang masih memiliki kedudukan utama dan memiliki

pengaruh yang cukup besar dalam analisa hubungan internasional. Namun demikian, isu-isu yang sesungguhnya telah muncul di tahun 70an, seperti isu lingkungan, hak asasi manusia, gender, dan pengungsi semakin menguat. Persoalan yang pada awalnya tidak dianggap penting ini faktanya telah berhasil mempengaruhi pengambilan keputusan pada beberapa negara.

Konstruktivisme berbeda dengan realisme dalam memandang dunia. Jika realisme lebih mementingkan aspek material, konstruktivisme lebih kepada aspek non-material. Menurut realisme sendiri, bahwa benda mati (fakta kasar) seperti kekuatan militer dan ekonomi dari suatu negara menentukan tindakan dari negara tersebut. Cara pandang dari konstruktivisme yang bersebrangan tersebut, terjadi karena hubungan internasional adalah masalah sosial, maka determinan tindakan negara adalah pemahaman bersama (*shared understanding*) atau meminjam terminologi dari Alexander Wendt sebagai intersubektivitas (Wendt, 1999). Intersubektivitas berarti tindakan aktor dalam hubungan internasional tidak semata derivasi dari kepentingan yang inheren dan sudah seperti itulah adanya dan seharusnya (*given*), tetapi produk dari proses pemaknaan aktor tersebut.

Dalam menjelaskan fenomena internasional yang terjadi, konstruktivisme berlandaskan pada kata kunci norma. Norma dipahami sebagai “harapan-harapan kolektif mengenai perilaku yang pantas bagi aktor dengan identitas tertentu” (Katzenstein, 1996). Norma membantu mendefinisikan situasi yang terjadi, oleh karena itulah norma dapat mempengaruhi interaksi antar negara (Zehfuss, 2004). Kepentingan negara didefinisikan pada konteks nilai dan norma internasional. Aktor-aktor hubungan internasional, dalam hal ini terutama negara, melakukan tindakan karena dituntun oleh aturan-aturan, prinsip-prinsip, norma yang disepakati bersama, serta keyakinan yang kesemuanya ini menyediakan pengertian tentang apa yang penting, berharga, baik dan cara-cara apa yang efektif atau *legitimate* dalam rangka mencapai suatu hal (Finnemore, 1996). Peraturan dan norma yang diikuti sudah terlanjur dianggap alami, benar, dikehendaki, dan sah. Aktor-aktor internasional melakukan tindakan yang mereka anggap pantas untuk dilakukan berdasarkan peraturan dan norma tersebut. Jadi konstruktivisme tidak peduli dengan

masalah kepentingan yang menyetir kebijakan negara akan tetapi apa yang membentuk kepentingan dan bagaimana kepentingan itu terbentuk.

Konstruktivisme mengutamakan tiga konsep yang mempengaruhi sebuah tindakan manusia dalam hubungan internasional, yaitu identitas, norma dan bahasa (Wendt, 1999). Konsep yang hendak ditekankan untuk penelitian ini adalah konsep identitas dan juga norma. Alexander Wendt mendefinisikan identitas sebagai “atribut yang melekat pada diri aktor yang mendorong tindakan” (Wendt, 1999). Artinya, identitas dapat membentuk kepentingan aktor baik seseorang maupun negara, yang kemudian kepentingan itu membentuk tindakan yang nantinya secara tidak langsung juga akan membentuk identitas. Baik identitas yang sama atau berubah menjadi identitas baru.

Membahas tentang identitas, ada beberapa literatur yang membahas tentang identitas, melalui literatur yang dikumpulkan tersebut, penulis berusaha untuk mencari tahu bagaimana identitas suatu negara dapat dilihat dan ditentukan. Mengenai pengertian identitas sendiri sebenarnya sulit untuk menentukan secara pasti, namun menurut pengertian yang dilontarkan oleh Jenkins dalam tulisannya mengatakan bahwa identitas adalah sebuah cara bagaimana sebuah individu ataupun sebuah kolektivitas dapat dibedakan dalam hubungan sosialnya dengan individu maupun dengan kolektivitas lainnya (Jenkins, 1996). Identitas sendiri juga dapat dipahami sebagai pemahaman tentang peran yang spesifik dan ekspektasi akan seseorang yang relatif lebih stabil (Wendt, 1992). Hal tersebut menyebutkan bahwa identitas akan menyediakan pemahaman dan definisi tentang siapa yang menjadi aktor tersebut. Lebih lanjut lagi, Kowert dan Legro juga mengatakan mengenai identitas, bahwa identitas adalah hal yang dapat dijadikan pedoman atau petunjuk representasi bagi aktor politik tentang dirinya dan tentang bagaimana hubungannya dengan satu sama lain (Kowert & Legro, 1996).

Hal lainnya yang dapat ditelusuri untuk mengetahui bagaimana identitas suatu negara adalah dengan memperhatikan bagaimana budaya atau *habits* dari suatu negara. Budaya yang diinternalisasikan kemudian dipraktikkan dalam sehari-hari dapat mendorong adanya identifikasi mengenai masyarakat tersebut melaksanakan dan memberlakukan sebuah budaya yang sama. Budaya merupakan

sistem yang dapat mengatur pikiran dari masyarakat yang secara kolektif dapat membedakan keanggotaan suatu identitas dengan identitas lainnya (Hofstede et al., 2005). Adanya persamaan dalam pengimplementasiannya dari budaya tersebut dapat menunjukkan bahwa telah adanya pemahaman yang sama sehingga hal tersebut dapat memunculkan sebuah rasa solidaritas yang dapat memperkuat identifikasi yang kemudian pada akhirnya terbentuk sebuah identitas kolektif tertentu, yang mana identitas tersebut juga ada pada negara. Adanya pemahaman mengenai budaya dalam bentuk praktik, persepsi dan juga adanya perasaan yang terjadi secara terus-menerus yang kemudian menjadi *habits* atau kebiasaan tersebut juga dikemukakan oleh Ted Hopf sebagai hal yang pada akhirnya menghasilkan sebuah identitas (Hopf, 2010). Ted Hopf kemudian menyatakan bahwa hal tersebut bisa berkontribusi pada bagaimana sebuah negara mempersepsikan aktor lainnya, yaitu sebagai teman atau musuh, serta bagaimana sebuah negara harus menghadapi aktor tersebut (Hopf, 2010).

Mengenai budaya sendiri, Alexander Wendt mengatakan bahwa budaya pada konstruktivisme adalah hasil dari *shared knowledge* atau adanya persamaan atas pemahaman tentang suatu ide, hingga membentuk norma. Kemudian hal tersebutlah yang dapat mendorong mengenai kebijakan apa yang dapat dilakukan oleh negara pada sistem internasional yang anarki (Wendt, 1999). Anarki menurut Wendt sendiri adalah hasil dari apa yang dilakukan atau dibuat antar negara, maksudnya adalah suatu kondisi yang maknanya sendiri bergantung pada hubungan antar negara. Dalam budaya anarkinya, Wendt membagi menjadi 3, yaitu hobbesian, lockean, dan kantian. Dalam budaya anarki hobbesian, ciri utamanya adalah hubungan yang saling bermusuhan, "*threatening adversaries who observe no limits in their violence towards each other*" (Wendt, 1999). Dalam budaya lockean, orientasinya adalah saling bersaing, "*competitors who will use violence to advance their interests but refrain from killing each other*" (Wendt, 1999). Untuk yang terakhir adalah kantian, dalam budaya kantian negara menganggap satu sama lain sebagai teman, "*allies who do not use violence to settle their disputes and work as a team against security threats*" (Wendt, 1999).

Kembali lagi mengenai identitas, hal esensial lainnya yang dapat digunakan untuk memahami mengenai bagaimana identitas suatu negara adalah bahasa. Bahasa yang digunakan dalam negara dapat dianggap menjadi faktor untuk mempersatu yang kemudian mendukung pembentukan identitas secara kolektif seperti identitas negara. Patricia M. Goff dan juga Kevin C. Dunn menyebutkan bahwa kemampuan secara kolektif dalam membentuk sebuah identitas tidak hanya didorong oleh fakta bahwa individu-individu yang menempati teritori atau wilayah yang sama. Goff dan Dunn melihat hal tersebut bahwa hal yang menyebabkan pembentukan identitas kolektif dari sebuah negara lebih didorong oleh fungsi dari asset yang digunakan secara bersama yang di dalamnya termasuk bahasa (Goff, 2004). Penggunaan bahasa sebagai asset yang digunakan secara bersama tersebut dilihat sebagai hal yang dapat memunculkan solidaritas di suatu lingkup negara. Kemudian dengan adanya penggunaan bahasa yang sama, maka timbulah rasa *sense of belonging* dalam masyarakat sehingga memunculkan rasa kesatuan yang sama. Adanya rasa *sense of belonging* tersebut yang mana dari penggunaan bahasa yang sama ini pada akhirnya menjadi unsur pendorong dari identifikasi masyarakat dalam suatu identitas kolektif tertentu, yang di dalam hal ini berupa identitas suatu negara.

Sejarah adalah faktor lainnya yang dapat dibahas mengenai proses dari pembentukan sebuah identitas. Identitas dari sebuah negara juga dapat dilihat dan terbentuk karena adanya rasa kesatuan atas pemahaman dan makna dari sebuah peristiwa sejarah yang terjadi di masa lampau, hal tersebut dikemukakan oleh Friedrich Kratochwil. Kemudian Kratochwil menyebutkan bahwa sejarah tidak hanya sebagai sebuah tempat penyimpanan data secara permanen, tetapi sebagai produk dari memori yang kemudian secara dalam terkandung dan mempengaruhi pembentukan identitas pada suatu negara (Kratochwil, 2006). Adanya memori historis tersebut merupakan salah satu faktor yang mendorong adanya konstruksi dalam sebuah identitas. Nietzsche, seperti yang dikutip juga oleh Kratochwil, menambahkan bahwa dalam memutuskan apa yang harus dilakukan oleh sebuah negara, yang mana negara sebagai aktor sebelumnya harus dapat melihat dan belajar dari apa yang pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah (Kratochwil, 2006). Hal tersebut mengindikasikan bahwa sejarah dapat menjadi alat yang bisa memberikan

mengenai gambaran dan juga pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak harus dilakukan.

Kemudian Alexander Wendt juga membagi empat jenis identitas dalam hubungan internasional (Wendt, 1999). Pertama adalah identitas personal atau *corporate identity* dimana identitas suatu aktor terbentuk secara alamiah dan tidak ada unsur paksaan. Selain itu, identitas personal berfokus untuk menunjukkan perbedaan satu aktor dengan aktor lainnya seperti bentuk fisik, lambang negara, nasionalisme dan lain-lain. Karena identitas ini disadari oleh negara bersangkutan sejak awal, maka identitas ini cenderung stabil tergantung bagaimana negara tersebut melihat dirinya sendiri. Dengan adanya identitas personal, terbentuklah empat dasar kepentingan negara yaitu keamanan fisik suatu aktor, sikap dan keinginan aktor dalam mempertahankan identitas, pengembangan aspirasi hidup masing-masing dan keinginan aktor agar identitasnya diakui oleh lainnya (Wendt, 1994).

Identitas kedua adalah identitas tipe atau *type identity*. Identitas ini dipengaruhi oleh kategori tertentu seperti ideologi politik atau agama, dan terbentuknya identitas ini bisa secara alamiah seperti identitas personal atau berubah bentuk karena suatu peristiwa. Sama seperti identitas personal, identitas tipe relatif stabil.

Identitas ketiga adalah identitas peran yang memfokuskan kedudukan atau posisi aktor dalam hubungan internasional. Identitas ini baru bisa terbentuk apabila aktor yang bersangkutan melakukan suatu aktivitas hubungan internasional dengan aktor lain dan mendapat tanggapan. Jenis identitas ini memiliki hubungan dengan pembentukan identitas menjadi kebijakan luar negeri yang diungkapkan oleh Holsti dalam jurnalnya *National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy*. Terbentuknya kebijakan luar negeri suatu aktor dipengaruhi oleh faktor internal (unsur negara, opini publik, dan lainnya) dan faktor eksternal (nilai dan norma internasional, opini dari aktor lainnya, dan lain-lain). Apabila digabungkan, selanjutnya akan terlihat apa posisi suatu aktor dan bagaimana aktor tadi seterusnya bertindak dalam hubungan internasional (Holsti, 1970).

Identitas terakhir adalah identitas kelompok atau *collective identity*. Jenis identitas ini terbentuk ketika terdapat suatu kelompok yang berisikan kumpulan aktor

negara saling berhubungan, dan pada akhirnya membentuk suatu identitas yang dimiliki secara bersamaan karena bergabung dengan kelompok tersebut. Hubungan antar aktor negara bisa terjadi karena saling ketergantungan atau karena rasa solidaritas yang tinggi. Wendt memaparkan tiga faktor yang membentuk identitas kolektif suatu aktor (Wendt, 1994). Pertama adalah faktor sistemik atau faktor interaksi antar negara. Faktor kedua adalah faktor struktural atau faktor intersubjektivitas antarnegara. Identitas kolektif kemudian baru terbentuk bila dua atau lebih negara sama-sama mengidentifikasi satu sama lain sebagai kawan. Faktor terakhir adalah faktor strategis atau faktor komunikasi antarnegara. Negara yang bersikap ramah pada negara lainnya tentu akan mendapat tanggapan positif dan timbulnya rasa solidaritas satu sama lain.

Adanya konstruktivisme membuat pengetahuan dan penelitian dalam hubungan internasional yang menyoroti perilaku kebijakan luar negeri berbeda secara ontologis dan epistemologis. Proses pengambilan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri melibatkan relasi antara struktur negara dengan elemen kekuatan masyarakat. Karakteristik interaksi politik antaraktor tidak melulu didominasi oleh kompetisi kepentingan material, tetapi lebih kepada kompleks melibatkan ide, nilai, dan institusi. Dalam kasus pengungsi Venezuela, konstruktivisme memberikan paradigma alternatif dan memberi warna dalam analisa yang terjadi dalam kasus tersebut. Memformulasikan asumsi dasar aktor utama dalam mengambil keputusan dengan konstruksi sosial.

Seperti yang dikatakan sebelumnya, konsep yang dapat digunakan dalam menganalisa studi kasus Pengungsi dari Venezuela ke Kolombia dalam teori konstruktivisme dapat dilakukan dengan cara melihat pada identitas serta norma.

1.3.2 Pengungsi

Persoalan tentang pengungsi dalam dunia hubungan internasional mengemuka diakibatkan oleh telah usainya perang dunia kedua. Jika pada masa itu pengungsi terjadi dikarenakan oleh perang, maka setelah masa perang dunia kedua, atau lebih tepatnya pada masa perang dingin hingga sekarang, isu tentang pengungsi muncul dikarenakan oleh munculnya konflik internal di negara-negara tertentu

sehingga memunculkan gelombang pengungsi. Umumnya para pengungsi tersebut menginginkan adanya rasa aman dan menghindari tekanan-tekanan sosial, keamanan serta politik dari negara asalnya. Bagaimanapun sistem internasional sudah sangat mendukung untuk terjaminnya keadaan pengungsi ke negara tujuannya, namun untuk selanjutnya adalah bagaimana respon dari negara yang akan dituju oleh pengungsi tersebut dalam menangani gelombang pengungsi yang terjadi.

Berbicara tentang pengungsi, akan ada beberapa definisi dari apa itu pengungsi, siapa saja yang bisa dikatakan oleh pengungsi, kemudian mengapa bisa dikatakan sebagai pengungsi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa persoalan pengungsi mencuat terjadi karena dunia pada saat itu telah terjadi peperangan yang hebat. Persoalan tentang pengungsi terlebih bagi para pengungsi yang telah melewati batas dari sebuah negara, tentu akan saling berkaitan dengan studi hubungan internasional. Selain itu pula, tentu saja persoalan pengungsi akan menyinggung juga tentang berbagai hal yang berkaitan di ilmu hubungan internasional. Seperti kerjasama internasional, ham internasional, globaliasi, organisasi internasional, rezim internasional, peran berbagai aktor, regionalisme, serta masalah keamanan dalam dunia internasional. Namun bagaimanapun hal yang menarik adalah mengapa para pengungsi menuju ke suatu negara tertentu.

Berbicara tentang pengungsi dan hubungan internasional, hal ini sudah dibahas dalam *Convention Relating to the Status of Refugee 1951*, mendefinisikan pengungsi sebagai *As a result of events occurring before 1 January 1951 and owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable, or owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it*. Dapat dikatakan bahwa pengungsi adalah mereka yang merasa ketakutan (dengan alasan) akan dianiaya karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu, atau karena perbedaan pendapat politik dan berada di luar negaranya yang mana karena

kecemasannya tidak dapat kembali, atau merasa takut, atau tidak ingin kembali ke asal tempat tinggalnya. (UNHCR, 2007)

Namun, dalam definisi yang dihasilkan oleh Konvensi 1951 tersebut, hanya mengatakan bahwa sebagai hasil dari kejadian yang terjadi sebelum 1 Januari 1951. Oleh karena itu pengertian dari pengungsi diperluas lagi dalam *Protocol Relating to the Status of Refugees 1967* yang mengatakan bahwa *For the purpose of the present Protocol, the term “refugee” shall, except as regards the application of paragraph 3 of this Article, mean any person within the definition of Article 1 of the Convention as if the words “As a result of events occurring before 1 January 1951 and ...” and the words “... a result of such events”, in Article 1 A (2) were omitted.* Dalam hal ini tentu sudah terlihat jelas bahwa pengertian pengungsi masih sama, hanya saja pendefinisian diperluas tidak hanya kejadian yang terjadi sebelum 1 Januari 1951.

UNHCR mengidentifikasi berbagai faktor penyebab terjadinya pengungsian internasional. Faktor politik biasanya terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan penguasa dan aparat keamanan penyebab terjadinya berbagai pelanggaran hak asasi manusia, yang pada akhirnya menimbulkan pengungsian massal ke negara lainnya yang dapat memberikan jaminan keamanan, kesejahteraan, dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan. Faktor ekonomi merupakan pendorong terjadinya pengungsian internasional, utamanya yang terkait dengan miskinnya suatu negara, krisis ekonomi berkepanjangan, kelaparan, wabah penyakit meluas, kriminalitas meningkat tajam, dan berbagai dampak negatif lainnya, membuat rakyat lebih memilih untuk meninggalkan negara asalnya dan mencari penghidupan tempat di negara lain sebagai tempat mengungsi. Faktor agama juga merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya pengungsian internasional, sebagaimana terjadi pada pengungsi Palestina, Afghanistan, Etnis Rohingya. Selain itu, perang juga merupakan faktor terbesar penyebab pengungsian internasional. Mereka yang meninggalkan negaranya biasanya untuk menghindari dampak perang yang berkepanjangan ke negara lain yang aman, seperti halnya peperangan yang terjadi di kawasan Timur Tengah, Afganistan, dan kawasan dunia lainnya.

1.4 Hipotesa

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan kerangka dasar pemikiran yang digunakan dan telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sementara bahwa Kolombia bersedia menerima sebagian besar pengungsi Venezuela karena adanya alasan identitas dan norma.

1.5 Tujuan Penelitian

Melalui penelitian yang berjudul “LATAR BELAKANG KOLOMBIA MENJADI TUJUAN UTAMA PENGUNGI DARI VENEZUELA 2015-2021”, penulis memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang Kolombia mau menerima sebagian besar pengungsi dari Venezuela.

1.6 Jangkauan Penelitian

Untuk memberikan pembahasan yang fokus dalam penelitian, maka penulis membatasi ruang lingkup kajian agar pembahasan tidak keluar dari tema utama dan tujuan yang diinginkan. Adapun fokus penelitian yaitu dalam rentang waktu tahun 2015-2021, ketika pada 2015 mulai meningkatnya arus pengungsi dari Venezuela hingga 2021 yang di mana terjadi sebuah pandemi di dunia, namun masih terjadi arus pengungsi menuju Kolombia.

1.7 Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian studi kasus. Penulis memanfaatkan data-data yang telah dikumpulkan untuk dijabarkan secara explanatif melalui penulisan narasi. Untuk melengkapi data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data *library research* (studi kepustakaan) dengan memanfaatkan data-data sekunder yang dikumpulkan melalui buku-buku, jurnal, artikel, portal berita, laporan resmi dari pemerintah maupun non-pemerintah, dan website yang kredibel.

1.8 Sistematika Penulisan

BAB I berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang sejarah dari krisis yang terjadi di Amerika Latin, yang mengakibatkan arus pengungsi terjadi. Khususnya antara negara Kolombia dengan Venezuela.

BAB III berisi tentang alasan pemerintah Kolombia mau menerima pengungsi dari Venezuela, yaitu karena alasan persamaan identitas dan faktor norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan pemerintah Kolombia.

BAB IV merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dari seluruh analisis dan pembahasan dalam penelitian ini. Kesimpulan mengandung ringkasan dari seluruh pembahasan, serta *highlight* terhadap temuan-temuan baru yang dihasilkan dalam penelitian ini.